



Peserta Lemhannas RI akan Menjadi Bagian Proses Pembuatan Kebijakan

Selasa (16/10), peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVII Lemhannas RI Tahun 2012 yang dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA menerima Pembekalan dari Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta.

Dalam laporannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan kepada Presiden RI bahwa penyelenggaraan PPSA XVIII diikuti 50 peserta, terdiri dari para pejabat eselon satu dan dua yang terdiri dari 26 orang TNI dan Polri serta 24 orang dari kementerian dan lembaga, perguruan tinggi dan juga partai politik. Sementara untuk PPRA XLVII diikuti 77 peserta, terdiri dari 36 orang TNI dan Polri, 34 peserta dari kementerian dan lembaga, perguruan tinggi. Sedangkan tujuh peserta lainnya dari negara sahabat yaitu Malaysia, Yordania, Timor Leste, Vietnam, Singapura, Mali dan Filipina.

Pada pembekalannya, Presiden RI mengingatkan bahwa Lemhannas RI adalah lembaga yang penting karena dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta, mengajarkan mengenai sistem dan manajemen, serta memberikan pemahaman kepemimpinan baik tingkat senior maupun strategis.

Pada kesempatan ini juga, Presiden RI memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta Lemhannas RI dan berharap agar seluruh peserta bertambah sukses dalam pelaksanaan tugas mendatang setelah kembali ke wilayah penugasan yang akan menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan serta



Redaksi :

Pengarah :

Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Penanggung Jawab :

Brigjen TNI Sahat Aritonang.

Redaktur :

Megawarni Simamora, S.E, M.M.

Penyunting/Editor :

Kolonel Laut (P) Estu Prabowo,

Letkol Caj G.T. Situmorang.

Redaktur Pelaksana :

Bambang Iman Aryanto, S.T., Trias

Noverdi, S.S., Endah Heliana, S.Sos.

Desain Grafis & Fotografer :

Arianto S.H., Sertu Syafrizal.

Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Gatot, Indah Winarni.

Distribusi :

Letkol Inf. Sumurung, , Lettu Cba

Supriyono, Suryadi.

Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI,

Jl.Medan Merdeka Selatan No. 10

Jakarta Pusat, 10110, Telp. (021)

3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

DaftarIsi:

- 1 Peserta Lemhannas RI akan Menjadi Bagian Proses Pembuatan Kebijakan**
- 3 Wapres : Reformasi Birokrasi membuat Birokrasi jadi Mandiri**
- 4 Pendidikan, Ujung Tombak Pembentukan Karakter Bangsa**
- 5 Asean Leadership, faktor penting Ketahanan Regional**
- 6 Tiga Pendekatan menjaga Stabilitas Keamanan Regional**
- 7 Aturan Hukum harus Jelas dan berdasar Kepentingan Nasional**
- 8 Revitalisasi Struktur Politik guna Meningkatkan Sinergitas Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Keutuhan NKRI**
- 9 Partisipasi Masyarakat Yang Tinggi Dituntut Dalam Budaya Politik**
- 10 Ketahanan Nasional Indonesia Meningkat**
- 11 Kekerasan pada Masyarakat Versus Budaya Bangsa**
- 12 Penataran Istri/Suami Peserta Pendidikan Lemhannas RI**



terlibat dalam rencana strategis yang dikembangkan secara lebih tepat. Ada keyakinan bahwa kualitas pemerintahan Indonesia dan negara sahabat bisa ditingkatkan manakala semua pejabat senior dapat menjalankan kaidah dan manajemen yang benar.

Turut hadir menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, antara lain Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara RI Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Agung Laksono, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Andi Mallarangeng, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Badan Intelijen Marciano Norman, dan Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsuddin.

Foto: Humas Lemhannas



Wapres : Reformasi Birokrasi membuat Birokrasi jadi Mandiri



Foto : Humas Lemhannas

“Bila ingin birokrasi yang kuat dan kebijakan berjalan mulus tanpa terkendala, maka birokrasi seyogyanya mandiri dengan manajemen yang akuntabel dan transparan.”

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono, M.Ec. saat pembekalannya kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII dan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVII Lemhannas RI Tahun 2012 di Istana Wakil Presiden pada hari Senin (17/9).

Menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta, Wakil Presiden RI menyatakan bahwa kebijakan bisa berubah, tapi pelayanan tetap berjalan dengan kemandirian birokrasi, kecuali kalau birokrat itu sendiri ikut berpolitik akan merepotkan, karena Birokrasi adalah alat untuk menjalankan kepentingan umum, bukan perorangan.

Jika sistem birokrasi di pusat dan di daerah bisa mandiri, maka ketika terjadi perubahan kalangan birokrat baik di pusat maupun di daerah tak perlu menunggu apa kebijakan baru karena sistemnya sudah berjalan dengan baik. Ditegaskan kembali oleh Wakil Presiden RI bahwa Reformasi birokrasi bertujuan untuk membuat birokrasi menjadi mandiri, agar dapat menjaga kontinuitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada pembekalan yang menghadirkan 2 program angkatan yakni PPSA XVIII dan PPRA XLVII, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA memberikan penjelasan tentang program pendidikan yang berlangsung saat ini. Lemhannas RI pada tahun 2012 ini mengadakan 3 (tiga) program pendidikan.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan kebangsaan dan implementasi dari kebijakan umum Dewan Pengarah 2012-2014. Dilaporkan juga oleh Gubernur Lemhannas RI bahwa PPSA XVIII, berlangsung selama 5,5 bulan, dimulai tanggal 17 April 2012, berakhir tanggal 25 Oktober 2012 dan PPRA XLVII, berlangsung 9,5 bulan, dimulai tanggal 24 Januari 2012, berakhir pada tanggal 18 Oktober 2012.

PPSA XVIII diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari TNI (AD, AL, AU), Polri, Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Organisasi Profesi, Partai Politik, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Lembaga Keagamaan. Sedangkan peserta PPRA XLVII sebanyak 77 orang, berasal dari TNI (AD, AL, AU), Polri, Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Kejaksaan Agung, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Organisasi Masyarakat, dan Peserta dari Negara Sahabat.

Pendidikan, Ujung Tombak Pembentukan Karakter Bangsa



Karakter Bangsa National Character



“Kalangan perguruan tinggi, sesungguhnya memiliki peran yang vital dan krusial dalam pembentukan watak dan karakter bangsa.”

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA pada rapat senat terbuka *Dies Natalies* ke – 49 Universitas Soedirman hari Selasa (25/9), di Purwokerto-Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan karena tidak terlepas dari fungsi perguruan tinggi yang mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam *Tri Dharma* Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat.

Dampak dari era globalisasi beserta dampaknya telah merubah persepsi ancaman terhadap eksistensi suatu negara. Bentuk ancaman tidak lagi secara fisik, tetapi berbentuk

halus, kompleks dan mencakup seluruh dimensi kehidupan nasional. Dewasa ini kerapuhan jiwa dan semangat kebangsaan merupakan potensi ancaman terbesar bagi keberlangsungan dan keutuhan bangsa.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, diperlukan upaya yang bersifat praktis implementatif pada tataran operasional melalui kegiatan – kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan dan *Training of Trainers* (TOT) tenaga penyuluh dengan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan. Namun tetap tidak melupakan upaya – upaya yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

“Hal ini dilakukan mengingat lembaga pendidikan merupakan ujung tombak yang efektif dalam pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda,” tegas Gubernur Lemhannas RI.

Disampaikan juga satu hal penting dan mendasar yang perlu dikembangkan yakni teladan secara nyata. Hal ini menjadi kata kunci dan kekuatan moral yang akan menentukan berhasil tidaknya upaya revitalisasi nilai – nilai empat konsensus nasional yang dilakukan. Teladan para pemimpin akan menjadi sarana efektif untuk membangun watak dan karakter kalangan muda bangsa.

Gubernur Lemhannas RI mengharapkan kepada civitas akademika Universitas Jenderal Soedirman agar dapat mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengandung nilai – nilai kejujuran, etika dan moral (watak atau karakter) dan nilai-nilai kebangsaan, mengembangkan *Tri Dharma* perguruan tinggi berbasis kemampuan dan kearifan lokal, dan membangun kesadaran dan kewaspadaan di kalangan mahasiswa terkait perilaku – perilaku yang dapat mengikis rasa nasionalisme, moral dan etika.



Asean Leadership

faktor penting Ketahanan Regional

Kamis (27/9), Lemhannas RI menyelenggarakan *Roundtable Discussion* Kajian Aktual dengan judul "*Asean Leadership* guna Mewujudkan *Asean Community* dalam rangka Ketahanan Regional" di Ruang Nusantara I, Gedung Trigatra Lemhannas RI, Jakarta.

Acara yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA ini, diantaranya menghadirkan Ketua Program Doktor dan Magister Fisip Unpad, Prof. Dr. Yan Yanyan Moch. Yani, MAIR, Ph.D, Direktur Eksekutif *Asean Foundation*, Dr. Makarim Wibisono, Wakil Dekan Fisip UI, Dr. Edy Prasetyono sebagai Pembicara. Selain itu juga, para pejabat Lemhannas RI seperti Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam membangun *Asean* diperlukan pola-pola kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua negara anggota *Asean* dan mampu menjembatani terjadinya interaksi antar masyarakat *Asean* melalui berbagai kegiatan, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan figur kepemimpinan yang visioner, mumpuni dan profesional.

Pada prinsipnya, pemimpin *Asean* harus menjadi pembangun konsensus yang sensitif terhadap berbagai kepentingan negara – negara anggota dan harus menjadi

seorang pemikir strategis yang mampu mengatasi masalah atau mendukung sebuah insiatif baru.

"Pemimpin *Asean*, harus mampu berkomunikasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di *Asean*, memiliki pola pikir yang mampu memantau dan mengevaluasi dampak dari rencana dan tindakan perbaikan ataupun perubahan dan dapat mengkomunikasikan hasil ataupun manfaat capaian-capaian *Asean* pada *Stakeholder* atau masyarakat *Asean*," jelas Gubernur Lemhannas RI saat membacakan *keynote speech*-nya.

Kepemimpinan *Asean* sangat diperlukan guna mendorong masyarakat *Asean* setara dengan masyarakat di negara-negara maju. Di mata dunia, *Asean* merupakan salah satu kekuatan strategis, sehingga harus dapat dimanfaatkan keberadaannya.

Melihat pentingnya peran *Asean* dalam dunia internasional, para anggota *Asean* telah menyepakati secara bersama berupaya meningkatkan daya saing *Asean* melalui strategi perwujudan *Asean Community* yang mencakup *Asean Security Community*, *Asean Economy Community*, dan *Asean Socio-Cultural Community*.

Dengan terselenggaranya kegiatan *Roundtable Discussion* ini telah dapat menghasilkan pemikiran – pemikiran yang cemerlang dalam menyusun *policy recommendation* bagi pemerintah, dalam hal ini Presiden RI untuk menentukan berbagai kebijakan, khususnya terkait dengan kepemimpinan bagi kemajuan *Asean*.



Tiga Pendekatan menjaga Stabilitas Keamanan Regional

"Guna menjaga stabilitas keamanan regional di Laut China Selatan, negara-negara yang berkepentingan, baik yang berstatus negara pengklaim maupun bukan negara pengklaim, hendaknya melakukan beberapa pendekatan-pendekatan satu sama lainnya."

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir Budi Susilo Soepandji, DEA saat menjadi salah satu narasumber pada Diskusi Terbatas tentang "Pertahanan Negara" pada hari Selasa (2/10) di kantor Wantimpres, Jakarta.

Dalam konteks regional, masih ada beberapa konflik yang terkait dengan perbatasan. Salah satu isu sengketa perbatasan yang kini menjadi topik bahasan terutama di kawasan asia pasifik adalah sengketa Laut China Selatan yang melibatkan enam negara yaitu China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia, selain itu juga menyangkut kepentingan kekuatan terbesar di kawasan seperti Amerika Serikat.

Dampaknya kini, sengketa ini tidak hanya lagi sebatas saling klaim wilayah dan perebutan sumber daya alam, tetapi telah menjadi isu kebebasan bernavigasi.

Gubernur Lemhannas RI dalam penjelasannya menguraikan pendekatan-pendekatan yang perlu ditempuh oleh negara-negara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

Pertama, menahan diri dari tindakan provokatif, dengan melihat perkembangan stabilitas di kawasan ini, semua pihak harus mampu menahan diri dari tindakan provokatif sehingga stabilitas keamanan dapat terjaga. Pihak-pihak yang berkepentingan juga harus menyadari bersama, satu-satunya solusi yang dapat diterima terhadap sengketa tersebut adalah

penyelesaian damai melalui dialog yang melibatkan semua pihak terkait.

Kedua, mempercepat penyusunan *code of conduct* (coc) Laut China Selatan, penyusunan coc ini bersifat krusial dan strategis, karena dengan hal itu akan mengatur bagaimana negara-negara pengklaim bertindak di kawasan Laut China Selatan. Diharapkan tindakan-tindakan yang bersifat provokatif akan dapat dicegah sedini mungkin, sehingga akan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keamanan kawasan tersebut.

Ketiga, pengaturan peran aktor non negara, peran perusahaan-perusahaan energi multinasional sebagai aktor non negara dalam menjaga kawasan sangat diperlukan, karena dengan kehadirannya di kawasan tersebut dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, *Asean* perlu menjajaki pengaturan peran perusahaan energi multinasional di kawasan sengketa tersebut.

Namun, dalam perspektif ketahanan nasional terhadap permasalahan sengketa kawasan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan rekomendasinya ditengah kepentingan dua kekuatan terbesar seperti China dan Amerika Serikat. **Pertama**, menyelesaikan permasalahan perbatasan secepat mungkin; **kedua**, menempatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai pertahanan terbaik bangsa; **ketiga**, mempercepat proses pembangunan yang mengarah kepada kemandirian bangsa dalam berbagai aspek, terutama ekonomi dan pertahanan dan keamanan; **keempat**, percepatan perwujudan postur *Minimum Essential Force* (MEF) pertahanan negara sebelum tahun 2024 yang diarahkan menjadi postur *Essential Force* pertahanan Negara.



Aturan Hukum harus Jelas dan berdasar Kepentingan Nasional

“Negara ini memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah, namun kita harus akui, bahwa pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal dan berjalan sesuai dengan harapan, bahkan disinyalir masih ada tumpang tindihnya berbagai peraturan, yang berdampak pada timbulnya persoalan di lini hulu maupun hilir.”

Pernyataan tersebut mengawali keynote speech Gubernur Lemhannas RI saat membuka diskusi panel pengkajian strategik tentang “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan guna Efektivitas Penerbitan Izin Usaha Bidang Pertambangan dalam rangka Ketahanan Nasional” pada hari Rabu (3/10) di Ruang Nusantara I, Gedung Trigatra Lemhannas RI, Jakarta.

Hadir sebagai narasumber adalah Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI, Irjen Pol Dr. H. Said Saile, Sekretaris Jenderal Ditjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Harya Adityawarman, Kepala Balitbang Provinsi Riau, Prof. Dr. Tengku Dahril, Deputi Operasi BP Migas, Dr. Gde Prapnyana, dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Budi Pranowo.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber kekayaan alam, khususnya pertambangan, seringkali menjadi konflik antara pihak pengelola dengan masyarakat atau dengan institusi pemerintah dikarenakan adanya perbedaan persepsi terhadap

hukum maupun peraturan yang ada.

Masalah pertambangan maupun agraria merupakan permasalahan yang pelik dan rumit. Jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mempengaruhi ketahanan wilayah maupun ketahanan nasional. Untuk itu diperlukan aturan hukum yang jelas dan mampu mengakomodir kepentingan stakeholder, dalam bingkai kepentingan nasional.

Berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa banyak izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh yang berwenang berpotensi menebar benih konflik di sejumlah wilayah di tanah air.

“permasalahan tumpang tindih berbagai peraturan pertambangan sudah seharusnya kita cari solusinya bersama-sama, sehingga pertambangan akan menjadi aset bangsa yang mampu menopang kemakmuran rakyat dan memperkokoh daya saing Indonesia pada tingkat regional maupun global,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Gubernur berharap diskusi panel yang dilaksanakan ini dapat menjadi dasar pemikiran bagi Lemhannas RI dalam menyusun rekomendasi kebijakan bagi Presiden RI dalam hal peraturan dan perundang-undangan dan penerbitan izin usaha bidang pertambangan.



Revitalisasi Struktur Politik

guna Meningkatkan Sinergitas Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka Keutuhan NKRI

Seminar Nasional Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII Lemhannas RI diselenggarakan pada hari Senin (8/10) di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta.

Seminar yang mengangkat judul “Revitalisasi Struktur Politik guna Meningkatkan Sinergitas Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka Keutuhan NKRI” menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya seperti Peneliti CSIS, J. Kristiadi, Walikota Depok, Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, dan Tenaga Profesional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Kausar. AS, M.Si. sebagai pembicara. Selain itu sebagai penanggung utama di antaranya Letjen TNI (Purn) TB. Silalahi, Dr. Ir. H. Akbar Tandjung, Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, MS, dan Prof Dr Djohermansyah Djohan, MA.

Seminar ini adalah salah satu kegiatan utama dari peserta pendidikan di Lemhannas RI yang juga sekaligus menjadi sarana tukar pikiran yang tertuang dari berbagai kemampuan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman para peserta yang telah diperoleh selama pendidikan.

Dalam seminar yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA ini menunjukkan

kondisi struktur politik nasional dalam kiprahnya menjalankan roda politik nasional dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat Indonesia secara luas.

Dengan kondisi yang kurang kondusif ini, memberikan implikasi kepada hubungan pemerintah dan pemerintah daerah yang belum dapat mengantisipasi bentuk-bentuk ancaman bersifat multidimensional yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan, dan keamanan.

Hal tersebut akan dapat berdampak pada munculnya disintegrasi bangsa apabila pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat mengelola dan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan prinsip demokratisasi terhadap anggota masyarakatnya.

Oleh karena itu, dengan terselenggaranya seminar nasional ini diharapkan dapat melahirkan solusi-solusi pemikiran yang cerdas dan cemerlang guna melengkapi konsepsi yang strategis yakni Konsepsi Revitalisasi Struktur Politik, baik dalam sisi kebijakan, strategi dan upaya.



Foto : Humas Lemhannas



Partisipasi Masyarakat Yang Tinggi Dituntut Dalam Budaya Politik



Foto : Humas Lemhannas

Rabu, (10/10) peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVII Lemhannas RI menyelenggarakan Seminar Nasional yang berjudul "Optimalisasi Budaya Politik Masyarakat Indonesia guna Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Tingkat Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional," di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta.

Seminar yang dibuka dan diresmikan oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA ini merupakan salah satu kegiatan utama PPRA dan PPSA Lemhannas RI dan diselenggarakan pada akhir-akhir pendidikan. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana tukar pikiran yang strategis bagi para peserta pendidikan dan juga menuangkan berbagai kemampuan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diperoleh selama pendidikan.

Seminar ini menghadirkan sebagai pembicara diantaranya adalah pengamat politik UI, Dr. Eep Saifullah, Anggota DPR RI, Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE, Peneliti Senior LIPI, Dr. Siti Zuhro, MA, dan Alumni PPSA XVII Lemhannas RI, Prof. Dr. A.S. Hikam. Sedangkan sebagai penanggap utama diantaranya seperti Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, Ir. Bambang Hary Murti, dan Guru Besar dari UGM, Prof Dr. Mochtar Mas'ood.

Terkait dengan judul yang diusung dalam seminar kali ini, sangatlah relevan bila melihat perkembangan situasi politik nasional yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Budaya politik Indonesia saat ini, sedang mengalami permasalahan serius yang

membawa Indonesia pada masa transisi demokrasi. Dan jika tidak tertangani dengan baik dan tepat, akan dapat menjadi ancaman serius terhadap ketahanan nasional.

Dalam sambutan Gubernur Lemhannas RI, disampaikan bahwa sistem demokrasi saat ini, sangat dituntut partisipasi masyarakat Indonesia dengan budaya politik yang sangat tinggi, yang betul-betul memahami jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, memahami sistem demokrasi yang dimiliki dan berbasis kepada nilai-nilai luhur dan kultur bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Disisi lain, suprastruktur politik terutama eksekutif dan legislatif harus dapat bersungguh-sungguh menjalankan prinsip-prinsip *good government* dan *clean government* agar mendapatkan kepercayaan publik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Melalui seminar ini, diharapkan akan mampu merumuskan konsepsi strategis, sebagai sumbang pikir untuk mengoptimalkan budaya politik masyarakat melalui peningkatan etika dan moral politik, peningkatan kualitas masyarakat, peningkatan pendidikan politik masyarakat dan peningkatan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan pembangunan nasional yang pada akhirnya akan memperkokohkeutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketahanan Nasional Indonesia Meningkatkan



Kamis (11/10), Lemhannas RI mengadakan *Roundtable Discussion* tentang Validasi dan Penyusunan Rekomendasi di Ruang Nusantara I, Gedung Trigatra, Lemhannas RI, Jakarta.

Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional saat ini secara intensif telah digunakan oleh Lemhannas RI sebagai salah satu sumber informasi bagi penyusunan rekomendasi kepada presiden, maupun sebagai instrumen *War Gaming* bagi peserta program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan peserta program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), serta dalam kegiatan studi strategis dalam negeri (SSDN).

Sistem pengukuran ketahanan nasional ini dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan identifikasi tentang isu-isu strategis wilayah dan menentukan skala prioritas pembangunan wilayah.

Lemhannas RI sendiri mempunyai komitmen untuk selalu melakukan updating dan validasi terhadap sistem pengukuran yang digunakan. Sejauh ini telah melakukan *updating* sebanyak tiga kali dalam tiga tahun terakhir, baik mengenai indikator maupun parameter yang digunakan dalam pengukuran ketahanan nasional.

Gubernur menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan basis studi tahun 2011,

diperoleh temuan bahwa dilihat berdasarkan indeks ketahanan nasional, ternyata ketahanan nasional Indonesia mengalami peningkatan, baik secara agregat maupun per gatra, meski masih pada posisi kurang tangguh.

Isu strategis yang memerlukan perhatian bersama adalah masih tingginya ketimpangan antar wilayah, masih belum sinerginya kebijakan pemerintah pusat dan daerah, masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, menurunnya daya dukung alam, masih belum maksimalnya pelayanan birokrasi.

Harapan dalam penyelenggaraan *Roundtable Discussion* akan menghasilkan kesimpulan yang cerdas dan cemerlang, yang dapat digunakan untuk mempertajam rekomendasi Lemhannas RI kepada Presiden RI.

Acara yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA ini menghadirkan narasumber yakni, Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas RI, Dr. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA, dan Deputi II Bidang Pemantauan dan Hubungan Kelembagaan UKP4, Hanief Arie Setianto. Selain itu pula, dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, dan beberapa pejabat Lemhannas RI lainnya.



Kekerasan pada Masyarakat Versus Budaya Bangsa

Kegiatan *Coffee Morning* dengan kalangan media massa cetak dan elektronik yang acaranya berbentuk diskusi interaktif dengan narasumber kembali diselenggarakan pada hari Jumat (12/10), di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra, Lemhannas RI, Jakarta.

Diskusi yang dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA. menghadirkan narasumber seperti Frans Magnis Suseno, para Pemimpin Redaksi, dan Tenaga Pengkaji bidang Sosial Budaya. Kegiatan yang turut dihadiri oleh beberapa Pemred dan sejumlah wartawan dari berbagai media massa dan elektronik mengangkat tema diskusi "Kekerasan pada Masyarakat Versus Budaya Bangsa".

Tema ini layak didiskusikan, mengingat perkembangan dewasa ini konflik sosial di tanah air semakin meningkat. Berdasarkan data yang dimiliki Kemdagri, jumlah konflik sosial pada 2010 sebanyak 93 kasus. Kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus. Namun kemudian meningkat pada 2012 menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah konflik sosial yang terjadi di Indonesia selama 2010 hingga Agustus 2012 mencapai 259 kasus.

Kekerasan yang terjadi dan berkembang di masyarakat

tentunya menjadi ancaman tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diperparah dengan rendahnya pengamalan Pancasila, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika tidak ditangani secara serius, berbagai aksi kekerasan yang muncul di permukaan akan mereduksi citra masyarakat Indonesia yang sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang berbudaya luhur dan berbudi pekerti yang baik.

Tujuan diselenggarakannya diskusi ini adalah meningkatkan *sharing ideas* dan diskusi antara Lemhannas RI dan media massa yang berperan dalam penyebarluasan wawasan kebangsaan di tengah meluturnya nasionalisme, serta memberikan pemahaman dan agenda bersama untuk penguatan kebangsaan.

Diharapkan juga dalam diskusi ini akan terjadi penguatan hubungan antara pemerintah dan media massa dalam memberikan pemahaman kebangsaan mengenai keberagaman dan kebhinnekaan. Selain itu, lahir pemahaman dan persepsi yang komprehensif mengenai besarnya peran dan kerjasama pemerintah dan para pimpinan media massa dalam membangun paham kebangsaan dan menjaga keutuhan NKRI.



Penataran Istri/Suami Peserta Pendidikan Lemhannas RI

Seperti pada program pendidikan di Lemhannas RI sebelumnya, baik pada Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) maupun Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), menjelang berakhirnya penyelenggaraan pendidikan di Lemhannas RI tahun 2012 diselenggarakan penataran isteri/suami peserta selama 5 hari.

Tujuan diadakannya penataran ini adalah : pertama, meningkatkan wawasan, pengetahuan dan cakrawala pandang para isteri/suami peserta sejalan dengan berkembangnya wawasan dan pengetahuan para peserta setelah mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. kedua, mempererat ikatan kekeluargaan antara sesama isteri/suami peserta dengan personil organik Lemhannas RI.

Dengan diselenggarakannya tiga angkatan program pendidikan pada tahun 2012 yaitu, PPSA XVIII, PPRA XLVII, dan PPRA XLVIII Lemhannas RI, penataran isteri/suami peserta pun terselenggara pada tiga angkatan yaitu dari isteri/suami peserta PPSA XVIII Lemhannas RI yang berlangsung pada tanggal 9 s.d 16 Oktober 2012, isteri/suami peserta PPRA XLVII Lemhannas RI yang diselenggarakan pada tanggal 17 s.d 23 Oktober 2012, dan isteri/suami peserta PPRA XLVIII Lemhannas RI akan berlangsung pada bulan Desember 2012.

Dari kegiatan penataran ini akan terbentuk keakraban dan saling mengenal dengan landasan ikatan batin yang kokoh, selain itu juga akan dapat menjadi wahana terciptanya iklim persahabatan yang kondusif dan komunikatif di masa mendatang.

Keberhasilan para peserta pendidikan di Lemhannas RI dalam meniti karir dan mengemban tugas ke depan tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran isteri/suami selaku

pendamping. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya keharmonisan suami/isteri terus dijaga melalui pemeliharaan dan penyesuaian wawasan, moral dan etika.

Hakikat penataran ini adalah menyiapkan para isteri/suami agar lebih mantap peranannya dalam membantu suami/isteri, dalam hubungan kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Penataran ini juga sebagai upaya memantapkan peran peserta penataran dalam organisasi, dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Diharapkan pada penataran yang singkat ini dapat bermanfaat bagi para pesertanya seperti dalam hal menyerap pengetahuan, saling menukar pengalaman, dengan para Tenaga Ahli Pengajar atau penceramah maupun antar sesama peserta penataran atau dengan peserta dalam rangka menyongsong dan menghadapi tantangan tugas dan kehidupan yang akan datang.

